



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL  
Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telepon : (021) 5253004  
Laman : [www.kemenkumham.go.id](http://www.kemenkumham.go.id)

Nomor : SEK.2.KP.03.03-5258  
Lampiran : 1 (Satu) berkas  
Hal : Pemberitahuan Seleksi Terbuka JPT Madya  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

12 Oktober 2022

Yth. 1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian;  
2. Sekretaris Utama Lembaga;  
3. Gubernur Provinsi.  
(sebagaimana daftar terlampir)  
di  
Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- d. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 84);
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2021);
- g. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-KP.03.03-255 tanggal 2 September 2022 hal Rencana Pengisian JPT Madya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- h. Surat Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-3300/JP.00.00/09/2022 tanggal 20 September 2022 hal rekomendasi rencana Seleksi Terbuka JPT Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- i. Pengumuman Nomor SEK-KP.03.03-689 tanggal 11 Oktober 2022 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan hormat disampaikan hal-hal berikut:
  - a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah membuka pendaftaran Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan terhitung mulai tanggal 11 s.d. 25 Oktober 2022;
  - b. Ketentuan dan persyaratan pendaftaran dapat dilihat dalam lampiran surat ini dan juga di laman <http://pansel.kemenkumham.go.id>.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon perkenan Saudara/i untuk dapat menginformasikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Saudara/i, yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi dimaksud.
4. Demikian untuk maklum.

a.n. Sekretaris Jenderal  
Kepala Biro Kepegawaian,



Sutrisno  
NIP. 196210151985031002

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
4. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Lampiran I Surat Kepala Biro Kepegawaian

Nomor : SEK.2.KP.03.03-5258

Tanggal : 12 Oktober 2022

**SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS KEMENTERIAN**

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
5. Kementerian Sekretariat Negara;
6. Kementerian Dalam Negeri;
7. Kementerian Luar Negeri;
8. Kementerian Pertahanan;
9. Kementerian Agama;
10. Kementerian Keuangan;
11. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
12. Kementerian Kesehatan;
13. Kementerian Sosial;
14. Kementerian Ketenagakerjaan;
15. Kementerian Perindustrian;
16. Kementerian Perdagangan;
17. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
18. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
19. Kementerian Perhubungan;
20. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
21. Kementerian Pertanian;
22. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
23. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
24. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
25. Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
26. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
27. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
28. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
29. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
30. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
31. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
32. Kementerian Riset dan Teknologi;
33. Kementerian Pemuda dan Olahraga;
34. Sekretariat Kabinet.

Lampiran II Surat Kepala Biro Kepegawaian  
Nomor : SEK.2.KP.03.03-5258  
Tanggal : 12 Oktober 2022

### SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA NON KEMENTERIAN

1. Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Arsip Nasional Republik Indonesia;
3. Badan Intelijen Negara;
4. Badan Kepegawaian Negara;
5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
6. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Badan Informasi Geospasial;
8. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
9. Badan Narkotika Nasional;
10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
12. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI;
13. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
14. Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
15. Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
16. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
17. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
18. Badan Pertahanan Nasional;
19. Badan Pusat Statistik;
20. Badan SAR Nasional;
21. Badan Standarisasi Nasional;
22. Lembaga Administrasi Negara;
23. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
24. Lembaga Ketahanan Nasional;
25. Lembaga Sandi Negara;
26. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.



Lampiran III Surat Kepala Biro Kepegawaian

Nomor : SEK.2.KP.03.03-5258

Tanggal : 12 Oktober 2022

### GUBERNUR PROVINSI

1. Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Gubernur Sumatera Utara;
3. Gubernur Sumatera Barat;
4. Gubernur Riau;
5. Gubernur Kepulauan Riau;
6. Gubernur Sumatera Selatan;
7. Gubernur Jambi;
8. Gubernur Lampung;
9. Gubernur Bengkulu;
10. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
11. Gubernur DKI Jakarta;
12. Gubernur Banten;
13. Gubernur Jawa Barat;
14. Gubernur Jawa Tengah;
15. Gubernur D.I. Yogyakarta;
16. Gubernur Jawa Timur;
17. Gubernur Kalimantan Barat;
18. Gubernur Kalimantan Selatan;
19. Gubernur Kalimantan Tengah;
20. Gubernur Kalimantan Timur;
21. Gubernur Kalimantan Utara;
22. Gubernur Sulawesi Utara;
23. Gubernur Sulawesi Tengah;
24. Gubernur Sulawesi Selatan;
25. Gubernur Sulawesi Barat;
26. Gubernur Sulawesi Tenggara;
27. Gubernur Gorontalo;
28. Gubernur Bali;
29. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
30. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
31. Gubernur Maluku;
32. Gubernur Maluku Utara;
33. Gubernur Papua;
34. Gubernur Papua Barat.